

# MODEL PEMBANGUNAN PERTANIAN MELALUI PENERAPAN AGROPOLITAN DAN AGROBISNIS DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

**Madziatul Churiyah**

**Abstrak:** Sektor pertanian juga merupakan sumber modal utama bagi pertumbuhan ekonomi modern. Dalam pembangunan pertanian terdapat tiga tahap, yaitu: pertanian tradisional (pertanian subsisten), penganeekaragaman produk pertanian, dan pertanian modern. Strategi dalam modernisasi pertanian, yaitu: perubahan teknologi dan inovasi, perbaikan pola pemilikan tanah, kebijaksanaan-kebijaksanaan penunjang dan tujuan pembangunan terpadu. Konsep pengembangan agropolitan pada dasarnya memberikan pelayanan perkotaan di kawasan pedesaan. agribisnis adalah sistem yang utuh dan saling terkait di antara seluruh kegiatan ekonomi (yaitu subsistem agribisnis hulu, subsistem agribisnis budidaya, subsistem agribisnis hilir, susbistem jasa penunjang agribisnis) yang terkait langsung dengan pertanian. Pengembangan agropolitan sangat diperlukan dalam mendukung agribisnis, yang dimasa mendatang berperan sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Agropolitan perlu diposisikan secara sinergis dalam sistem pengembangan wilayah. Pengembangan kawasan agropolitan bertujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing. Sasaran pengembangan kawasan agropolitan adalah untuk mengembangkan kawasan pertanian yang berpotensi menjadi kawasan agropolitan.

Kata-kata kunci: agropolitan, agribisnis, pembangunan ekonomi daerah

## PENDAHULUAN

Rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dari sebuah negara agraris menjadi negara Industri, ternyata telah diporak-porandakan oleh badai krisis yang telah berjalan dalam dua tahun terakhir menjelang tahun 2000. Sehingga pada saat krisis moneter yang berkepanjangan, dan terjadi penurunan nilai rupiah terhadap mata uang asing pada posisi yang sangat rendah ekonomi Indonesia sungguh memprihatinkan karena semua bahan baku untuk keperluan industri di import dan dibayar dengan mata uang asing.

Proses industrialisasi yang semu tersebut, disebabkan karena perekonomian nasional selama ini tidak dibangun diatas fundamental perekonomian dengan mengetengahkan keunggulan komperatif yang dimiliki Indonesia, yaitu negara

dibelahan iklim tropis yang banyak memiliki keanekaragaman hayati yang secara khusus adalah negara berbasis agraris oleh karena itu sebenarnya Indonesia sebelum masuk ke era industrialisasi memang terlebih dahulu harus masuk pada suatu ekonomi yang berbasis pertanian total dengan pemanfaatan teknologi industri yang sesuai, yang dapat dikembangkan menjadi komoditas agroindustri dan mampu bersaing dipasar dunia. Dalam konsep ini sektor kehidupan ekonomi yang lain akan terdorong maju, seiring dengan meningkatnya kemampuan untuk berkembang secara aman dan dinamis, karena basis ekonomi nasional sudah kuat dan berakar di masyarakat.

Sektor pertanian telah membuktikan paling survive pada krisis ekonomi yang terjadi pada era tahun 1997 sampai dengan sekarang, sektor ini yang paling tahan terkena badai krisis moneter yang terjadi di Indonesia. Hal ini telah membuka kesadaran dan cakrawala baru bahwa sektor pertanian khususnya perkebunan harus terus diupayakan sebagai basis untuk mengatasi krisis dan tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi, melalui pemberdayaan ekonomi rakyat dengan perangkat peraturan-peraturan yang memudahkan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi melalui sektor perkebunan dan agribisnis yang sepenuhnya Pemerintah harus mendukung. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan kawasan agropolitan dengan memanfaatkan potensi agribisnis yang ada.

## KAJIAN PUSTAKA

### Ruang Lingkup Pembangunan Pertanian

Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi, khususnya pada negara agraris yang beriklim tropis dan berada di wilayah garis khatulistiwa. Kemajuan dalam bidang pertanian akan terwujud jika para perencana pembangunan, dalam hal ini pemerintah bersungguh-sungguh dalam mengelola potensi alam yang ada dan dapat meningkatkan kesejahteraan para pengelola pertanian. Cara tersebut dapat ditempuh dengan menaikkan harga yang mereka terima atas produk-produk yang mereka hasilkan.

Ukuran sektor pertanian menjadikan sektor yang mempunyai peranan penting dalam menyediakan *input*, yaitu tenaga kerja bagi sektor industri dan sektor-sektor modern lainnya. Sektor pertanian juga merupakan sumber modal utama bagi pertumbuhan ekonomi modern. Modal berasal dari tabungan yang diinvestasikan dan tabungan berasal dari pendapatan.

Dalam pembangunan pertanian dibutuhkan tahapan-tahapan tertentu, menurut Arsyad (2004: 329) terdapat tiga tahap pembangunan pertanian, yaitu:

1. Pertanian tradisional (pertanian subsisten), menurut Todaro (2000: 456) "pertanian subsisten klasik, yaitu pertanian dimana sebagian output dikonsumsi sendiri oleh keluarga petani, produk andalannya adalah biji-bijian bahan pangan pokok (*satple food*) saja, dan tingkat produktifitasnya rendah karena menggunakan peralatan tradisional serta investasi modal yang minim".
2. Penganekaragaman produk pertanian, menurut Todaro (2000: 463) tahap ini juga dapat disebut pertanian campuran dan pertanian yang terdiversifikasi, tahap ini merupakan tahap transisi yang harus dilalui dalam proses peralihan dari pertanian subsisten menjadi produk yang terspesialisasi. Oleh karena itu penganekaragaman pertanian (*diversified farming*) merupakan suatu langkah pertama yang cukup logis dalam masa transisi dari pertanian tradisional ke pertanian modern (komersial). Dimana pada tahap ini tanaman pokok tidak lagi mendominasi produk pertanian, karena tanaman-tanaman perdagangan yang baru seperti; buah-buahan, kopi, coklat, teh, dan lain-lain, sudah mulai dijalankan bersama dengan usaha peternakan yang sederhana.
3. Pertanian modern, tahap ini juga dikenal dengan istilah pertanian spesialisasi . yang menggambarkan tingkat pertanian yang paling maju. "Dalam pertanian modern pengadaan pangan untuk kebutuhan sendiri dan jumlah surplus juga bisa dijual, bukan lagi merupakan tujuan pokok. Keuntungan komersial merupakan ukuran

dari keberhasilan dan nilai maksimum per hektar dari hasil upaya manusia dan sumber daya alam merupakan tujuan utama dari kegiatan pertanian" (Arsyad, 2004:332). Dengan demikian seluruh produksi diarahkan untuk keperluan pasar. Gambaran umum dari pertanian modern menitikberatkan pada satu jenis tanaman tertentu, komoditas yang ditanam terspesialisasi, dimana pengelolaannya menggunakan peralatan modern dan didukung dengan modal yang besar. Sistem pertanian modern saat ini sering dikenal dengan istilah agribisnis.

Dalam rangka meningkatkan produksi pertanian, setiap petani semakin lama semakin tergantung pada sumber dari luar lingkungannya. Dengan demikian diperlukan pembangunan pertanian yang harus dilakukan secara berkesinambungan. Berdasarkan pendapat Mosher yang dikutip oleh Arsyad (2004:333) syarat-syarat pembangunan pertanian jika pertanian akan dikembangkan dengan baik dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Syarat mutlak, syarat ini harus lengkap. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka pembangunan pertanian akan terhenti. Adapun yang termasuk syarat mutlak adalah:
  - a. Adanya pasar untuk hasil-hasil usaha tani.
  - b. Teknologi (teknologi pertanian) yang senantiasa berkembang.
  - c. Tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal.
  - d. Adanya perangsang produksi bagi petani.
  - e. Tersedianya pengangkutan atau transportasi yang lancar dan kontinyu.
2. Syarat-syarat atau sarana pelancar, syarat ini tidak mutlak tetapi kalau sarana tersebut ada maka akan dapat mempercepat pembangunan pertanian. Syarat atau sarana tersebut adalah meliputi:
  - a. Pendidikan pembangunan yang ditujukan kepada para petani.
  - b. Kredit produksi.
  - c. Kegiatan gotong royong petani.
  - d. Perbaikan dan perluasan tanah pertanian.
  - e. Perencanaan nasional pembangunan pertanian.

Modernisasi pertanian mutlak diperlukan bagi kemajuan dalam pembangunan pertanian sebab modernisasi merupakan salah satu syarat agar dapat bersaing dan dapat meningkatkan kualitas hasil pertanian. Menurut Arsyad (2004:336-339) ada beberapa strategi dalam modernisasi pertanian, yaitu:

1. Perubahan teknologi dan inovasi, teknologi baru dan inovasi-inovasi dalam bidang pertanian merupakan syarat bagi upaya peningkatan output dan produktivitas. Dalam strategi ini terdapat dua sumber inovasi teknologi yang dapat dijadikan sebagai sumber peningkatan hasil pertanian, yaitu:
  - a. Pengenalan terhadap mekanisasi pertanian sebagai ganti tenaga kerja manusia.
  - b. Inovasi biologis (bibit unggul, cara penanaman, dll) dan inovasi kimiawi (pupuk, insektisida, pestisida, dll), serta teknologi perbaikan mutu tanah yang ada.
2. Perbaikan pola pemilikan tanah, struktur pertanian dan pola penggunaan tanah perlu disesuaikan dengan tujuan ganda, yaitu meningkatkan produksi pangan dan meningkatkan pemerataan keuntungan bagi petani secara luas.
3. Kebijakan-kebijaksanaan penunjang, pembangunan pertanian tidak akan berhasil jika pemerintah tidak memberikan kebijakan-kebijaksanaan yang menunjang, seperti insentif-insentif yang diperlukan, kesempatan berusaha dalam kegiatan ekonomi, dan kemudahan untuk memperoleh input yang diperlukan sehingga memungkinkan para petani bisa meningkatkan output sekaligus produktivitasnya. Selain itu perlu penataan pola kepemilikan tanah, pelayanan-pelayanan penunjang dan kebijakan dalam hal input dan output pertanian mutlak diperlukan dalam pembangunan pertanian.
4. Tujuan pembangunan terpadu, pembangunan terpadu dapat diwujudkan melalui:
  - a. Perbaikan taraf hidup termasuk pendapatan, pendidikan, kesehatan atau nutrisi, perumahan dan hal-hal yang berhubungan dengan jaminan-jaminan sosial.

- b. Mengurangi ketimpangan pemerataan pendapatan di pedesaan dari ketimpangan perbedaan antara pedesaan dan perkotaan serta kesempatan-kesempatan berusaha.
- c. Perbaikan kapasitas sektor pedesaan dari waktu ke waktu.

## **PEMBAHASAN**

### **Kebijaksanaan Pembangunan Pertanian di Indonesia**

Menurut Anonymous yang dikutip oleh Sudaryanto dan Rusastra (2000:46) Kebijakan umum pembangunan pertanian dalam 5 tahun ke depan perlu mengacu kepada GBHN yang terkait dengan pembangunan pangan dan sektor pertanian, diantaranya:

1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.
2. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global dengan mengembangkan kompetensi dan produk unggulan daerah berbasis sumber daya domestik dan menghilangkan segala bentuk perlakuan distortif dan diskriminatif.
3. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing.
4. Mengoptimalkan peran pemerintah dalam mengembangkan kekuatan pelaku ekonomi pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar.
5. Mengembangkan sistem ketahanan pangan dengan mempertimbangkan aspek ketersediaan dan distribusi pangan, diversifikasi pangan dan gizi, pemberdayaan/ peningkatan pendapatan petani, dan keberlanjutan pembangunan pertanian.

Beberapa isu pokok kebijakan yang perlu mendapatkan penanganan dalam waktu dekat, adalah:

1. Kebijakan ketahanan pangan yang meliputi kebijakan harga, peningkatan produktivitas, distribusi pangan, dan diversifikasi pangan dan gizi;
2. Kebijakan pengembangan ekonomi kerakyatan, dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti program kemitraan, ketersediaan dan akses terhadap input dan sarana/prasarana pertanian, pemasaran dan pengembangan produk, dan pengembangan agribisnis; dan
3. Kebijakan yang mendukung desentralisasi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan aspek peningkatan SDM perencana, penyediaan teknologi spesifik lokasi, peningkatan kemampuan penyuluh dalam penyediaan dan penyampaian teknologi, mendorong penciptaan teknologi oleh petani, dan analisis sosial ekonomi pertanian.

Kebijakan pembangunan yang perlu mendapatkan penanganan perumusan, implementasi, dan analisisnya saat ini adalah yang terkait dengan reorientasi manajemen pembangunan pertanian. Reorientasi manajemen pembangunan tersebut menurut PSE yang dikutip oleh Sudaryanto dan Rusastra (2000:46): (a) Pergeseran dominasi perencanaan dari pusat ke daerah (desentralisasi); (b) Pergeseran dominasi pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah kepada masyarakat luas (petani, usaha kecil, dan menengah); dan (c) Pergeseran dominasi pengawasan dari pemerintah ke masyarakat luas (DPR, DPRD, LSM, pers, dan tokoh masyarakat).

Sedangkan menurut Arsyad (2004:340) terdapat beberapa kebijaksanaan pertanian di Indonesia, yaitu:

1. Bimas dan Inmas, bimas adalah suatu sistem penyuluhan yaitu pembimbingan petani ke arah yang lebih baik dan lebih maju, sehingga mampu meningkatkan usaha taninya, bimbingan ini dilaksanakan secara masal. Sedangkan inmas adalah identifikasi padi dengan fasilitas penyuluhan yang sama tetapi tanpa kredit.

- Pengaturan bimas dan inmas dilakukan oleh organisasi yang sama yaitu organisasi Bimas.
2. Kebijakan kredit pertanian.
  3. Kebijakan harga dasar dan harga tertinggi.

### **Konsep Pembangunan Pertanian Melalui Pengembangan Agropolitan dan Agrobisnis**

Konsep pengembangan agropolitan pertama kali diperkenalkan Mc.Douglass dan Friedmann (Syahrani, 2001:2) sebagai siasat untuk pengembangan perdesaan. Meskipun termaksud banyak hal dalam pengembangan agropolitan. Namun konsep ini pada dasarnya memberikan pelayanan perkotaan di kawasan pedesaan atau dengan istilah lain yang digunakan oleh Friedmann adalah "kota di ladang". Dengan demikian petani atau masyarakat desa tidak perlu harus pergi ke kota untuk mendapatkan pelayanan, baik dalam pelayanan yang berhubungan dengan masalah produksi dan pemasaran maupun masalah yang berhubungan dengan kebutuhan sosial budaya dan kehidupan setiap hari. Pusat pelayanan diberikan pada setingkat desa, sehingga sangat dekat dengan pemukiman petani, baik pelayanan mengenai teknik budidaya pertanian maupun kredit modal kerja dan informasi pasar.

Menurut Nasution yang dikutip oleh Sudaryanto dan Rusastra (2000:48) konsep Agropolitan pada dasarnya mencoba untuk mengakomodasi dua hal utama, yaitu menempatkan sektor pertanian sebagai sumber pertumbuhan ekonomi utama, dan diberlakukannya ketentuan-ketentuan mengenai otonomi daerah. Pentingnya wacana dan pengembangan agropolitan didasari oleh pemikiran lemahnya hubungan fungsional antara desa-kota, yang secara hakiki saling menghidupi, namun dalam kenyataannya bersifat eksploitatif. Secara garis besar konsep Agropolitan mencakup beberapa dimensi (Nasution, yang dikutip oleh Sudaryanto dan Rusastra (2000:48), yaitu:

1. Pengembangan kota-kota berukuran kecil sampai sedang dengan jumlah penduduk maksimum 600.000 dan luas maksimum 30.000 ha (setara dengan kota kabupaten);
2. Daerah belakang (pedesaan) dikembangkan berdasarkan konsep perwilayahan komoditas yang menghasilkan satu komoditas/bahan mentah utama dan beberapa komoditas penunjang sesuai dengan kebutuhan;
3. Pada daerah pusat pertumbuhan (kota) dibangun agroindustri terkait, terdiri atas beberapa perusahaan, sehingga terdapat kompetisi yang sehat;
4. Wilayah pedesaan didorong untuk membentuk satuan-satuan usaha yang optimal, yang selanjutnya diorganisasikan dalam wadah koperasi, perusahaan kecil dan menengah; dan
5. Lokasi dan sistem transportasi agroindustri dan pusat pelayanan harus memungkinkan para petani untuk bekerja sebagai pekerja paruh waktu (*partime workers*).

Besarnya biaya produksi dan biaya pemasaran dapat diperkecil dengan meningkatkan faktor-faktor kemudahan pada kegiatan produksi dan pemasaran. Faktor-faktor tersebut menjadi optimal dengan adanya kegiatan pusat agropolitan. Jadi peran agropolitan adalah untuk melayani kawasan produksi pertanian di sekitarnya dimana berlangsung kegiatan agribisnis oleh para petani setempat. Fasilitas pelayanan yang diperlukan untuk memberikan kemudahan produksi dan pemasaran antara lain berupa input sarana produksi (pupuk, bibit, obat-obatan, peralatan, dan lain-lain), sarana penunjang produksi (lembaga perbankan, koperasi, listrik, dan lain-lain), serta sarana pemasaran (pasar, terminal angkutan, sarana transportasi, dan lain-lain). Menurut pendapat (Syahrani, 2001:3) dalam konsep agropolitan juga diperkenalkan adanya agropolitan district, suatu daerah pedesaan dengan radius pelayanan 5 - 10 km dan dengan jumlah penduduk 50 - 150 ribu jiwa serta kepadatan minimal 200 jiwa/km<sup>2</sup>.

Jasa jasa dan pelayanan yang disediakan disesuaikan dengan tingkat perkembangan ekonomi dan sosial budaya setempat.

Agropolitan district perlu mempunyai otonomi lokal yang memberi tatanan terbentuknya pusat-pusat pelayanan di kawasan perdesaan telah dikenal sejak lama. Pusat-pusat pelayanan tersebut dicirikan dengan adanya pasar-pasar untuk pelayanan masyarakat pedesaan. Mengingat volume permintaan dan penawaran yang masih terbatas dan jenisnya berbeda, maka telah tumbuh pasar mingguan untuk jenis komoditi yang berbeda. Di Jawa, pusat-pusat pelayanan tersebut dikenal dengan nama pasar Pahing, Pon, Wage atau Kliwon, sedangkan di Jakarta dikenal dengan nama pasar Minggu, Senen, Rebo, dan Jum'at. Pusatpusat tersebut berfungsi sebagai pelayanan kebutuhan yang terkait dengan kegiatan yang produktif maupun untuk pelayanan kebutuhan non produktif.

Program pemerintah dengan menempatkan kantor Koperasi Unit Desa (KUD) dan Badan Usaha Unit Desa (BUUD) dipandang sebagai peningkatan pelayanan kepada kawasan pedesaan dalam menyalurkan sarana produksi maupun dalam menampung hasil panen. Pelayanan kesehatan juga mulai ditingkatkan di pusat desa maupun pusat kecamatan melalui pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di setiap kecamatan dan Puskesmas Pembantu pada desa-desa tertentu. Konsep pengembangan agropolitan distrik sebenarnya juga sudah diimplementasikan dengan cara pengembangan kawasan pemukiman baru melalui Pengembangan Unit Pemukiman Transmigrasi, Pengembangan Kawasan Andalan, Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET), dan Pengembangan Kawasan Sentra Produksi (KSP).

Agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri atas subsistem hulu, usahatani, hilir, dan penunjang. Menurut Saragih yang dikutip dalam Syahrani (2001:4), "batasan agribisnis adalah sistem yang utuh dan saling terkait di antara seluruh kegiatan ekonomi (yaitu subsistem agribisnis hulu, subsistem agribisnis budidaya, subsistem agribisnis hilir, subsistem jasa penunjang agribisnis) yang terkait langsung dengan pertanian". Agribisnis diartikan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari unsur-unsur kegiatan : (1) pra-panen, (2) panen, (3) pasca-panen dan (4) pemasaran.

Sebagai sebuah sistem, kegiatan agribisnis tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, saling menyatu dan saling terkait. Terputusnya salah satu bagian akan menyebabkan timpangnya sistem tersebut. Sedangkan kegiatan agribisnis melingkupi sektor pertanian, termasuk perikanan dan kehutanan, serta bagian dari sektor industri. Sektor pertanian dan perpaduan antara kedua sektor inilah yang akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik secara nasional (Sumodininggat, 2000: 21).

Menurut Kuncoro (2003: 403) agroindustri/agrobisnis mencakup dua jenis manufaktur, yaitu:

1. Industri penyedia input pertanian, seperti industri pupuk, pestisida dan penghasil mesin-mesin pertanian.
2. Industri pengolah hasil petanian, seperti industri pengolahan pucuk teh, industri tepung, industri gula, industri kayu, karet dan lain-lain.

Konsep agroindustri atau agrobisnis yang digunakan adalah agrobisnis dalam arti luas, yaitu selain mencakup industri pengolahan hasil pertanian dan industri penyedia input bagi pertanian, juga termasuk seluruh sub sektor dalam sektor pertanian, yang meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan (Kuncoro, 2003: 403).

### **Mengoptimalkan Agribisnis dalam Pembangunan Daerah Agropolitan**

Perkembangan agribisnis di Indonesia sebagian besar telah mencakup subsistem hulu, subsistem usaha tani, dan subsistem penunjang, sedangkan subsistem hilir masih belum berkembang secara maksimal. Telah banyak diperkenalkan bibit atau varietas unggul dalam berbagai komoditi untuk peningkatan produksi hasil pertanian. Demikian juga telah diperkenalkan teknikteknik bertani, beternak, berkebun, dan bertambak yang lebih baik untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Subsistem penunjang yang bersifat fisik dan fiskal telah lama

diperkenalkan kepada para petani. Jaringan irigasi telah banyak dibangun yang mampu mengairi jutaan hektar sawah dan lahan pertanian lainnya, untuk meningkatkan produksi pertanian.

Demikian juga fasilitas kredit pertanian telah lama diterapkan untuk meningkatkan produksi dan pemasaran berbagai komoditi pertanian. Meskipun sudah banyak yang telah dilakukan pemerintah dalam upaya mengembangkan agribisnis, tetapi masih terdapat berbagai kendala, terutama dalam menjaga kualitas produk yang memenuhi standar pasar internasional serta kontinuitas produksi sesuai dengan permintaan pasar maupun untuk mampu mendukung suatu industri hilir dari produksi pertanian. Salah satu alternatif untuk menjaga kontinuitas dari kualitas produk adalah dengan mengembangkan kegiatan agribisnis disesuaikan dengan potensi sumber daya alam. Potensi sumber daya alam tersebut tersebar tidak merata untuk setiap pulau/wilayah/daerah.

Pengembangan agribisnis di daerah diyakini akan dapat mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah berdasarkan potensi sumber daya dan keunggulan komparatifnya, meningkatkan perdagangan antar daerah, dan menciptakan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara lebih baik, dengan pertimbangan dan arahan strategi pengembangan Menurut Saragih yang dikutip oleh Sudaryanto dan Rusastra (2000:48) adalah sebagai berikut:

1. Mampu menekan biaya transportasi bahan baku dan sentra produksi bahan baku ke sentra agroindustri;
2. Mengurangi kerusakan selama pengangkutan karena disamping bersifat *bulky* dan *voluminous*, produk pertanian primer juga bersifat cepat rusak;
3. karena itu perlu reorientasi pengembangan lokasi agroindustri dan pusat-pusat konsumen ke daerah sentra produksi bahan baku;
4. Perlu dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan sektor agribisnis komoditas unggulan berdasarkan potensi sumber daya, perspektif pengembangan dikaitkan dengan pusat pertumbuhan dan kerja sama ekonomi;
5. Penentuan pusat pertumbuhan sektor agribisnis dan komoditas yang dikembangkan perlu dilakukan koordinasi dan rekonsiliasi antara kepentingan pusat, daerah, dan departemen terkait sehingga diperoleh keputusan yang kondusif bagi kepentingan investasi.

Pengembangan agribisnis di setiap daerah setidaknya tidak hanya puas pada pemanfaatan kelimpahan sumber daya yang ada (*factor driven*) atau mengandalkan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) seperti sekarang ini, tetapi secara bertahap harus dikembangkan ke arah agribisnis yang didorong oleh modal dan kemudian kepada agribisnis yang didorong oleh inovasi. Dengan perkataan lain, keunggulan komparatif agribisnis pada setiap daerah ditransformasi menjadi keunggulan bersaing melalui pengembangan mutu sumber daya manusia, teknologi, kelembagaan dan organisasi ekonomi lokal yang telah ada pada masyarakat setiap daerah. Dengan transformasi agribisnis seperti ini, kemampuan rakyat untuk menghasilkan produk-produk agribisnis yang saat ini masih didominasi oleh produk-produk yang bersifat *natural resources and unskill labor based*, secara bertahap beralih kepada produk-produk agribisnis yang bersifat *capital and skill labor based* dan kemudian kepada produk yang bersifat *knowledge and skill labor based*.

Dengan transformasi produk agribisnis sedemikian rupa, maka produk-produk agribisnis yang dihasilkan oleh setiap daerah dapat mampu bersaing dan memasuki segmen pasar yang lebih luas di pasar internasional. Pengembangan produk yang demikian juga akan memperbesar manfaat ekonomi yang dapat dinikmati oleh rakyat di setiap daerah. Pengembangan agribisnis di setiap daerah harus juga disertai dengan pengembangan organisasi ekonomi, khususnya rakyat petani, agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat benar-benar dinikmati oleh rakyat dan daerah. Di masa lalu, rakyat petani (bahkan daerah sentra-sentra agribisnis) hanya menikmati nilai tambah dari subsistem on farm agribisnis yang umumnya relatif kecil. Nilai tambah yang paling besar, yakni pada subsistem agribisnis hulu dan hilir, dinikmati oleh para pedagang atau pengusaha luar daerah.

Di masa yang akan datang, para petani harus diikutsertakan untuk menikmati nilai tambah pada subsistem agribisnis hulu dan hilir melalui pengembangan koperasi agribisnis yang ikut mengelola subsistem agribisnis hulu dan hilir melalui usaha patungan dengan pengusaha swasta atau BUMN/BUMD yang saat ini telah eksis pada subsistem tersebut. Jika pengembangan agribisnis yang demikian dapat berlangsung di setiap daerah, maka perekonomian daerah akan mampu berkembang lebih cepat. Setiap peningkatan perkembangan agribisnis di daerah akan secara langsung mendorong pengembangan ekonomi daerah, karena sebagian besar nilai tambah agribisnis akan tertahan di daerah yang bersangkutan. Selanjutnya peningkatan pendapatan rakyat di daerah akan menarik perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya di luar agribisnis, sehingga kesempatan-kesempatan ekonomi baru akan berkembang di setiap daerah. Meningkatnya kesempatan ekonomi baru di setiap daerah akan mampu menghambat arus urbanisasi, bahkan sebaliknya mampu mendorong ruralisasi sumber daya manusia, sehingga penduduk yang selama ini terkonsentrasi di Pulau Jawa akan menyebar ke seluruh daerah tanpa program transmigrasi.

Pengembangan agropolitan sangat diperlukan dalam mendukung agribisnis, yang dimasa mendatang berperan sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Agropolitan perlu diposisikan secara sinergis dalam sistem pengembangan wilayah. Seperti yang diungkapkan Fadel Muhammad (2003) bahwa pengembangan kawasan agropolitan adalah bertujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan mendorong berkembangnya system dan usaha agribisnis yang berdaya saing. Sasaran pengembangan kawasan agropolitan adalah untuk mengembangkan kawasan pertanian yang berpotensi menjado kawasan agropilitan melaui: (1) pemberdayaan masyarakat pelaku agribisnis agar mampu meningkatkan produksi, produktivitas komoditi pertanian serta produk-produk olahan pertanian, yang dilakukan dengan pengembangan system dan usaha agribisnis yang efisien, (2) penguatan kelembagaan petani, (3) Pengembangan kelembagaan system agribisnis (penyedia agroinput, pengelolaan hasil, pemasaran dan penyedia jasa), (4) pengembangan kelembagaan penyuluhan pembangunan terpadu, (5) pengembangan iklim yang kondusif bagi usaha dan investasi. Implementasi konsep agropolitan dalam pengembangan wilayah dilakukan melalui penerapan sistem pemukiman kota dan pedesaan serta Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) yang terkait dengan kawasan budidaya dan system transportasi.

## DAFTAR RUJUKAN

- Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Kuncoro, Mundrajad. 2003. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yagyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN
- Muhammad, Fadel. 2003. *Pengemhangan Agropolitan di [Provin.si](http://www.pu.go.id/Ditjen-kota/BULETIN/Edisi%20No.2/Pengembangan%20Agropolitan.htm) Gorontalo*, (Online), (<http://www.pu.go.id/Ditjen-kota/BULETIN/Edisi%20No.2/Pengembangan%20Agropolitan.htm>), diakses 24 Maret 2006)
- Sudaryanto, Tahlim & Rusastra, I Wayan. 2000. *Kebijaksanaan dan Perspektif Penelitian dan pengembangan Pertanian dalam Mendukung Otonomi Daerah*. FAE, 18 (1): 45-56



- Syahrani, Husainie. 2001. *Penerapan Agropolitan dan Agribisnis dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. FRONTIR, 33 (4): 1-10.*
- Todaro, Michael.P. 2000. *Pemhangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Terjemahan oleh Haris Munandar. 2000. Jakarta: Erlangga.